


Menilai Sektor Potensial dan Pengelolaan Strategi Perikanan di Bantaeng, Sulawesi Selatan

Assessing potential sector and fishery management strategies in Bantaeng, South Sulawesi

Agus Kurniawan B✉

Management of Resources Fisheries, University of Puangrimanggalatung, ,
Jl. Puangrimanggalatung No. 27 Sengkang 90915, Wajo District, South Sulawesi, Indonesia,

✉Corresponding author: aguskurniawan1608@gmail.com / info@uniprima.ac.id

 <https://orcid.org/0000-0002-0454-3358>

ABSTRAK

Kebijakan daerah yang tepat dapat mengoptimalkan pembangunan, tata kelola sumberdaya dan dapat mengidentifikasi masalah kelembagaan. Kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari keunggulan komparatif baik dari arah kebijakan dan keunggulan sektor-sektor. Pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Bantaeng secara intensif, optimal dan terkendali mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi serta dapat memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan umum *Location Quotient* (LQ), *SWOT analysis* dan *AHP method*. Dalam hal ini menyajikan kemampuan sektor unggulan di Kabupaten Bantaeng menggunakan *Location Quotient* (LQ) yang didapatkan setiap tahun pada sektor perikanan yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2014 sebesar 1.49, tahun 2015 sebesar 1.39, tahun 2016 1.39, tahun 2017 sebesar 1.37 dan tahun 2018 sebesar 1.35. Hal ini menunjukkan sektor basis unggulan Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan secara terus menerus. Analisis SWOT didapatkan nilai prioritas I faktor Kekuatan - Peluang sebesar 2.87, prioritas II Kekuatan - Ancaman sebesar 2.55, Prioritas III Kelemahan - Peluang sebesar 2.37, dan Prioritas IV Kelemahan - Ancaman sebesar 2.05. dari hasil Metode AHP yang didapatkan untuk alternative Strategi Prioritas Perikanan (I) Potensi budidaya rumput laut sebesar 0.391, Prioritas (II) Mengoptimalkan Wilayah Pesisir 0.289, Prioritas (III) Peningkatan daya saing produk perikanan sebesar 0.217. penelitian ini dapat dijadikan acuan Pemerintah dalam penguatan sektor perikanan daerah.

Kata kunci: strategi kebijakan, sektor perikanan, *location quotient*, *SWOT analysis*, *AHP method*, Bantaeng.

Pendahuluan

Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Strategi manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan perlu dicermati, cepat atau lambat akan beralih ke masalah tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan yang memandu proses pengambilan keputusan.

Penggunaan sumber daya yang ada di Kabupaten Bantaeng belum mampu menaksir potensi yang akan diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pengembangan basis ekonomi sektoral, serta kesempatan kerja yang beragam diharapkan dapat menjadi pembangunan sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas dalam menentukan sektor mana yang akan menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

Masyarakat dan Wilayah Pesisir

Masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng bermata pencaharian sebagai nelayan selama ini dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dimana faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal serta akses, jaringan pedagang ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadi pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan. Hasil-hasil studi tentang tingkat kesejahteraan hidup di kalangan nelayan telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi nelayan dan tidak mudah diatasi (Satria, 2002; Sugiharto, dkk, 2013).

Ciri khas wilayah pesisir di Bantaeng jika ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka.

Berkaitan dengan percepatan dan efisiensi pengembangan wilayah, perlu dilakukan penentuan sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan spesialisasi lokasi. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan suatu sektor/komoditi dalam suatu wilayah relative terhadap sektor/komoditi pada wilayah lainnya (Djakapermana Ruchyat, 2009:42).

Kemampuan suatu daerah atas suatu sektor dapat dilihat dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor tertentu tersebut dalam suatu wilayah. Artinya sektor tersebut bisa memproduksi lebih dari pada yang dibutuhkan oleh daerahnya, sehingga memiliki potensi untuk menjadi daerah pengekspor. Dengan menggunakan metode *Location Quotient*, maka kemampuan sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Bantaeng dapat dimanfaatkan sebagai titik potensial.

Arah Kebijakan

Kebijakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yaitu Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk : 1) Pengembangan agribisnis sektor perikanan dan kelautan 2) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sektor perikanan dan kelautan 3) Pengembangan sumber daya manusia sektor perikanan dan kelautan 4) Peningkatan produksi dan pelayanan sektor perikanan dan kelautan 5) Pengembangan usaha kemitraan sektor perikanan dan kelautan 6) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan kecil. 7) Pengembangan kelembagaan. Dengan tujuan yang direncanakan oleh lembaga perikanan dan kelautan sehingga hal ini dapat terwujudnya pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (Dinas Kelautan dan Perikanan).

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi serta dapat memberikan

efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun daerah dan belum dapat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga pada saat ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat pesisir masih berada dibawah garis kemiskinan.

Metodologi

Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk Menganalisis peranan sektor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng digunakan metode *Location Quotient (LQ)*, yaitu mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah pada sektor-sektor yang dianggap sebagai sektor basis (*basis sector*) yang dapat dibandingkan dengan pangsa aktivitas tersebut dalam wilayah secara agregat. Persamaan indeks LQ menurut Widodo (2006) sebagai berikut:

$$LQ = \frac{(V_{ik}/V_k)}{(V_{ip}/V_p)}$$

Keterangan: V_{ik} = Nilai output (PDRB) sektor i di Kabupaten Bantaeng; V_k = PDRB total semua sektor di Kabupaten Bantaeng; V_{ip} = Nilai output (PDRB) sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan; V_p = PDRB total semua sector di Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis SWOT

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

Tahap pertama dalam analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Adapun responden yang diminta melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Dari sisi pemerintah daerah. Dari kelompok ini, responden yang mengisi kuisisioner adalah dari SKPD Bappeda sebanyak 5 responden, dan Dinas Perikanan dan Kelautan 8 responden;
2. Dari sisi Akademisi, Pemerintah Daerah, dan Pengamat Pembangunan. Dari kelompok ini terdapat responden yang mengisi kuisisioner, yaitu 3 orang Dosen dari Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin, 2 responden dari Camat Bantaeng dan 2 dari Pengamat Pembangunan.

Jumlah total responden yang melakukan penilaian/pengisian kuisisioner adalah sebanyak 20 responden.

Tabel. 1 Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		EKTERNAL	
		Faktor Eksternal	
INTERNAL	Faktor Internal	Strength (S)	Threat (T)
		Strategi SO	Strategi ST
		Weakness (W)	Strategi WO
			Strategi WT

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

Analytical Hierarchy Process

Ciri pemecahan model AHP adalah menggunakan hirarki yang menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dapat dibagi menjadi Goal, Skenario, Sasaran, dan Strategi (Gambar 1).

Dalam penelitian ini, hirarki yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang terbaik adalah hirarki yang terdapat pada diagram 4.1. Alternatif strategi yang digunakan merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya.



Gambar 1. Bagan Penyusunan Hirarki Model AHP

Hasil dan Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka Identifikasi sektor-sektor unggulan serta pemilihan strategi kebijakan pembangunan yang paling tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan pendekatan analisis LQ, SWOT dan AHP.

Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil yang didapatkan dari sektor basis LQ dan beberapa alternatif strategi, maka dilakukan pemilihan prioritas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Hasil *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Bantaeng, Tahun 2014-2019

Sektor	2014		2015	
	Nilai	LQ	Nilai	LQ
	1,699,092.90	1.49	1,307,056.20	1.39
	2016		2017	
	Nilai	LQ	Nilai	LQ
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,049,338.0	1.39	2,206,069.0	1.37
	2018		2019	
	Nilai	LQ	Nilai	LQ
	2,359,500.80	1.35	-	-

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan nilai sebesar 1,49 pada tahun 2014, 1,39 pada tahun 2015, 1,39 pada tahun 2016, kemudian menurun sebesar 1,37 pada tahun 2017 dan kembali menurun sebesar 1,35 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya tetapi hal ini menunjukkan bahwa pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor basis atau sektor unggulan Kabupaten Bantaeng.

Hasil dan Analisis SWOT

Berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT. Dari hasil pembobotan kuisisioner, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah (Tabel 3).

Tabel. 3. Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	<i>Strength - Opportunity (SO)</i>	2.87
II	<i>Strength - Threat (ST)</i>	2.55
III	<i>Weakness - Opportunity (WO)</i>	2.37
IV	<i>Weakness - Threat (WT)</i>	2.05

Sumber: Data diolah Matriks Interaksi IFAS-EFAS 2019



Sumber: Data diolah Matriks Interaksi IFAS-EFAS 2019.

Gambar. 2. Diagram Strategi SWOT Kabupaten Bantaeng

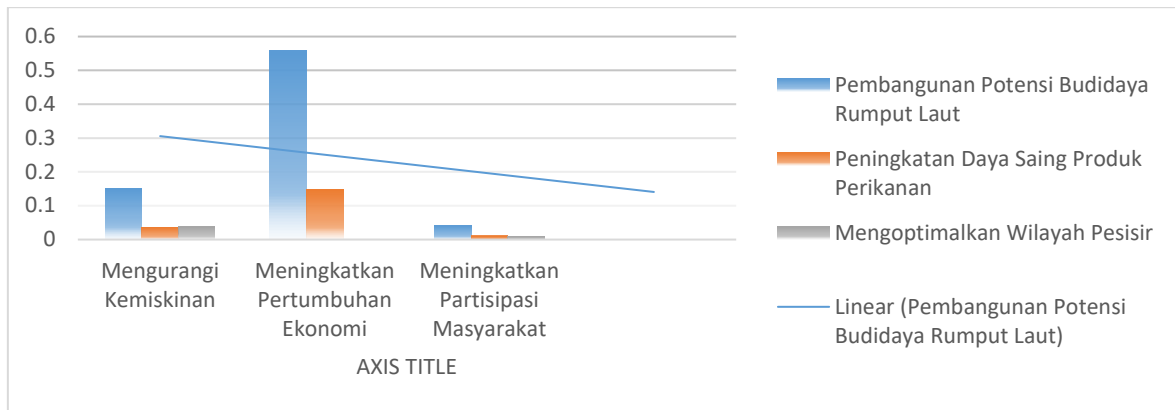
Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity* (SO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada (Gambar 2). Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, kelemahan lebih besar dari pada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T.

Hasil dan Analisis AHP

Model AHP yang digunakan dalam penelitian ini, hirarki yang disusun terdiri dari 4 level, dengan level puncak sebagai fokus/goal dari hirarki. Berdasarkan pembobotan yang telah diberikan sebelumnya, kemudian dilakukan pengolahan data, sehingga dihasilkan nilai konsensus seperti yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut. dilakukan pengolahan data, sehingga dihasilkan nilai konsensus seperti yang dapat dijelaskan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel. 4. Hasil Pengolahan Prioritas Kebijakan AHP

Level	Sasaran	Bobot
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	0.558
2	Mengurangi Kemiskinan	0.149
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0.039

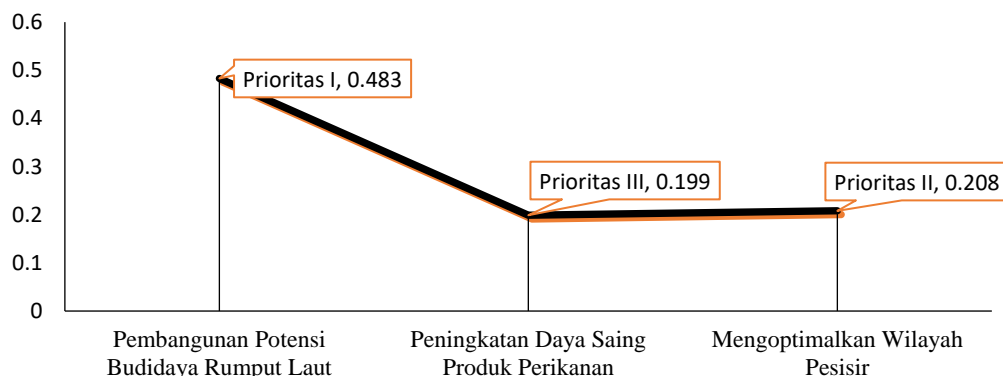


Gambar. 3. Grafik Sasaran Pembangunan Perikanan

Daerah dapat melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang paling tepat, sehingga terhindar dari pemborosan keuangan daerah ataupun melakukan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat ini, maka berdasarkan penilaian para *expert*, prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pembobotan yang telah diberikan sebelumnya (Tabel 5).

Tabel. 5. Hasil Pengolahan Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Pembangunan Perikanan		
Prioritas	Strategi	Grand Total
I	Pembangunan Potensi Budidaya Rumput Laut	0.391
II	Mengoptimalkan Wilayah Pesisir	0.289
III	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	0.217



Sumber: Data diolah Prioritas Kebijakan 2019

Gambar. 4. Grafik Strategi Pembangunan Perikanan

Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode AHP, untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi, didapatkan prioritas strategi kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut;

1. *Memfaatkan Potensi Budidaya Rumput Laut* yang dimiliki Kabupaten Bantaeng, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk rumput laut yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Bantaeng Potensi Sumber Daya.

Akan Tetapi menurut responden pada sektor budidaya ini diperlukan usaha pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas (**Prioritas I**)

2. Mengoptimalkan Wilayah Pesisir yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, dan menjadikan sebagian wilayah pesisir menjadi wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup luas, kondisi sosial dan politik juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (**Prioritas II**)
3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Industri kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah sedang tumbuh di Kabupaten Bantaeng masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas. meningkatkan jiwa kewirausahaan dapat didukung dengan perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan produktifitas, daya saing, nilai tambah, kualitas kinerja dan daya serap tenaga kerja. Sehingga sangat potensial untuk dapat dikembangkan dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bantaeng. (**Prioritas III**)

Kesimpulan

Dilihat dari strategi kebijakan yang Kompetitif dan Realisasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mengembangkan kebijakan percepatan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi Perikanan dengan Produktivitas Rendah dapat di lakukan percepatan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan yang memanfaatkan teknologi tepat guna.
2. Memanfaatkan Potensi Perikanan tangkap dan Budidaya rumput laut yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng
3. Pengembangan Potensi Wisata wilayah pesisir yang memiliki banyak dampak terhadap perekonomian Kabupaten Bantaeng.
4. Memperkuat ekonomi melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi yang dapat menunjang kewirausahaan produk-produk perikanan.
5. Hasil pembobotan AHP untuk pencapaian Tujuan Pengembangan Kebijakan berdasarkan Daya Saing dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bantaeng adalah prioritas dalam solusi pembuatan Kebijakan. Permasalahan utama yang dikaji adalah: Struktur Perikanan memiliki produktivitas yang masih rendah sebagai masalah terbesar di Kabupaten Bantaeng.

Saran

Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan oleh pusat dan terkait wilayah seperti disebut di atas, maka hal yang harus ditindak lanjuti untuk tujuan dan sasaran dapat tercapai adalah: Pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat prioritas pembangunan yang mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah yang besar, karena meningkatkan sektor unggulan ini bisa meningkatkan produktifitas dari pertumbuhan ekonomi dan menjadi kontribusi yang cukup besar terhadap struktur ekonomi. Meningkatkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan usaha di bidang Perikanan menerapkan aplikasi teknologi maupun industri pengolahan, melakukan

kajian pariwisata di sekitar pesisir yang menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara, jika kabupaten bantaeng menghendaki untuk membuat sektor-sektor ini menjadi sektor unggulan.

Daftar Pustaka

- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2015.
- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2016.
- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2017.
- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2018.
- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2019.
- Anonymous, 2010, Bantaeng In Figures 2016. Central Bureau of Statistics (Bantaeng Regency in Figures) 2020.
- Amrullah, T. 2006. Analysis of the Influence of Infrastructure Development on Regional Economic Growth. University of Indonesia.
- Arsyad, L. 1999. Introduction to regional economic planning and development. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Asmarani, A. D. 2010. Strategy of Regional Development Policy of Klaten Regency: Approach of SWOT and AHP Analysis. Thesis. University of Indonesia.
- Brojonegoro P.S., Bambang. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Inter-University Center - Economic Studies University of Indonesia;
- Bappeda of Bantaeng Regency. 2015. Bantaeng In Figures 2016;
- Brojonegoro, B. P. S. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Inter-University Center - Economic Studies University of Indonesia.
- Djakapermana, R. D. 2009. Regional Development Through the system Approach. Bogor Agricultural Institute. Bogor.
- Djojohadikusumo, S. 1993. Development of Economic Thinking, Growth and Development Economy, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ghufron M. 2008. Analysis of the Development of Areas Based on the Superior Sector of Lamongan Regency, East Java Province. Bogor Agricultural Institute.
- Hutasoit, D. 2005. Kerinci Seblat National Park Management Strategy in Order to Reduce Forest Degradation Rate: A SWOT and AHP Analysis Approach. University of Indonesia.
- Idie, M. 1999, Concept of the Center for Economic Growth Planning in Supporting Consolidation of Regional Autonomy in Kaimana Fakfak District. University of Indonesia.
- Mankiw, G. 2003. *Principles of Economics*. 2th Edition. Cengage Learning. USA
- Richardson, H. 1973. The Basics of Regional Economics. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Saaty, L. Thomas. 2000. *Decision Making for Leaders*. University of Pittsburgh.
- Satria. A. 2002. Introductory sociology the coastal community. Jakarta: PT Cidesindo.
- Sugiharto, E. Salmani, dan Gunawan, B.I. 2013. Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelatan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis. 18(2).
- Susantono, B. 2009. Strategy in Spatial Planning and Regional Development. Said Hasta Pustaka, Jakarta.

